

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : R.168 Tingkat Keamanan : SR/R/T/B

Tanggal Penerimaan : 1/9/2021 Tingkat Kecepatan : K/SS/S/B

Tanggal dan Nomor Surat : 31/8/2021 120/288/DKI/2021
Dari : Kadiskominfo Provinsi Kepulauan Riau
Kepada : Kepala
Tembusan : -
Ringkasan isi : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020
Jumlah : 2 file

Kepada

Disposisi

1

2

~~YTH. SU~~Yth D3
D2

Plt. D32

D32A

C-1

MUDK 1/9/2021

C-2

Mudk

C-3

Pelajari sg bhn evaluasi//030921

C - 4 :

- Kompilasi dgn laporan pemda lain;
- siapkan infographic berupa tabel/ diagram pie utk perlihatkan prosentase permasalahan di daerah secara nasional

Tks

EKS-1487



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau - Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung B2 Lantai III) Pulau Dompak
Telp: 0771-4575023 Fax: 0771-4575123
E-mail: kominfo@kepriprov.go.id website: <http://kominfo.kepriprov.go.id>

TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

Nomor : 120/288/DKI/2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil
Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian
Pemda Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2020

Kepada.
Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
di-
Jakarta

Disampaikan dengan hormat, merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP/01.02/08/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Permintaan Laporan Pemantauan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada, yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kelembagaan Persandian pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Satuan Unit Kerja Eselon IV dengan Nomenklatur yang digunakan yaitu Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian. Dibentuknya unit kerja pelaksana urusan persandian setingkat Eselon IV sesuai dengan hasil pemetaan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 258 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Hasil Pemetaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan untuk Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait Keamanan Informasi E-Government dan Persandian, Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian berada di bawah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Tugas dan Fungsi Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dan persandian di Provinsi;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dan persandian di Provinsi;
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dan persandian di Provinsi;
4. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
5. Menyelenggarakan layanan insiden keamanan informasi;
6. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;

7. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan audit TIK;
9. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
10. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
11. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
12. Melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
13. Melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi;
14. Melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi;
15. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi tugas seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian;
16. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai seksi Keamanan Informasi *E- Government* dan Persandian;
17. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi Keamanan Informasi *E- Government* dan Persandian kepada atasan;
18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang 31 Agsutus 2021



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

 A. Dasar Hukum.....

 B. Tujuan.....

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020 ...

 A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

 B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

 C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2021

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

 A. Kesimpulan

 B. Saran

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN XI – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XII – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Laporan Tahunan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi

- Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1218 Tahun 2019 tentang Computer Security Incident Response Team Provinsi Kepulauan Riau (KEPRIPROV-CSIRT).

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN

TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian memiliki 2 Program Kerja program kerja dan 2 kegiatan, Sesuai dengan data pada Tabel 1 di bawah ini, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Operasional memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 1 (satu) kegiatan, sementara kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan memiliki jumlah sebanyak 1 (satu) kegiatan. Realisasi kegiatan pada ruang lingkup Operasional yaitu pada Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi memiliki serapan sebesar 100% dan Kegiatan pada ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi memiliki serapan anggaran sebesar 100%.

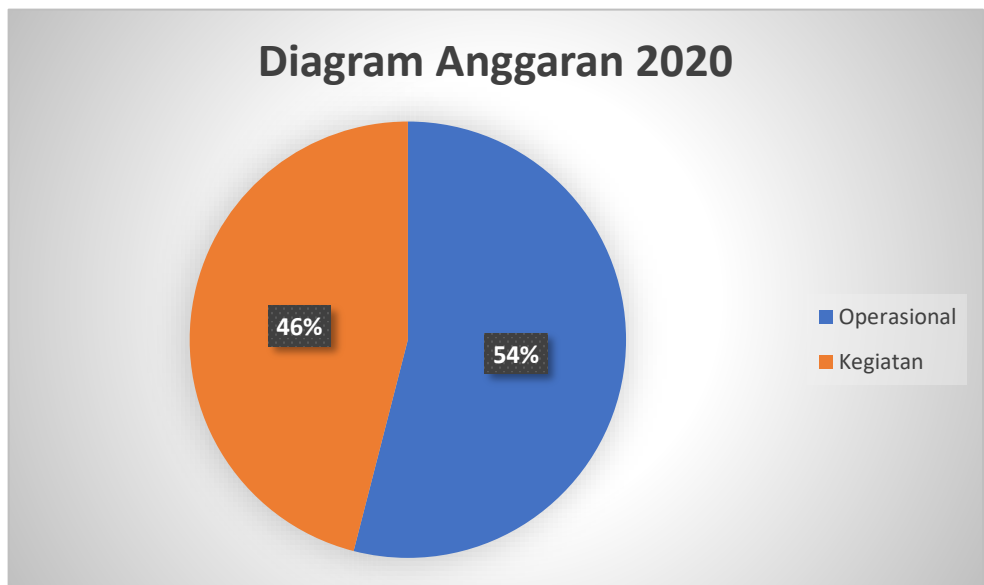
Tabel 1 Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Operasional (Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi)	1	1	100 %
2	Kegiatan <i>It Security Assesment</i>	1	1	100%
Total		2	2	100 %

Tabel 2 Realisasi Kegiatan Anggaran Bidang Persandian Tahun 2020

No	Ruang Lingkup	Jumlah Anggaran	Pagu Rasionalisasi	Realisasi	%
1	Operasional (Rasionalisasi Anggaran)	110.000.000	22.560.000	22.560.000	100 %
2	Kegiatan <i>It Security Assesment</i> (Rasionalisasi Anggaran)	93.532.500	10.797.100	10.797.100	100 %
Total		203.532.500	33.357.100	33.357.100	100 %

Diagram 1 Anggaran Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



Sesuai dengan Tabel 2 dan Diagram Anggaran Persandian Tahun 2020 berkaitan dengan Operasional memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- atau sebesar 54% dari total anggaran dan dirasionalisasi menjadi Rp. 22.560.000,- , sementara anggaran yang berkaitan dengan Kegiatan IT security assesment semula sebesar Rp. 93.532.500,- atau sebesar 46% mengalami rasionalisasi menjadi Rp. 10.797.100 dari total anggaran 2 kegiatan yang sebelumnya berjumlah Rp. 203.532.500,-.

Sementara untuk anggaran terkait Tata Kelola dan Pengawasan dan Evaluasi tidak ada dikarenakan oleh keterbatasan anggaran namun untuk tugas dan fungsi Keamanan Informasi *E-Government* dan persandian pada Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Instansi yang menangani Keamanan informasi *E-Government* dan Persandian pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian.

Pada tahun 2020 Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian melaksanakan beberapa tugas dan fungsi terkait persandian seperti Tata Kelola,

Operasional, Pengawasan dan Evaluasi dan Pembinaan dan Pengawasan, contoh kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian

NO	Program Kerja/ Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Rp. 22.560.000	100%	Terlaksananya Operasional kegiatan persandian pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2.	<i>IT Security Assesment</i>	Rp. 10.797.100	100%	Dilaksanakannya Audit Security Assessment untuk Aplikasi
3	Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi	-	-	Terlaksananya Kegiatan Workshop secara Daring tentang Keamanan Jaringan (AFSI dan BSSN)
4	Kontra Penginderaan	-	-	Tidak dilaksanakan Kondisi (Pandemi Covid 19)
5	Asistensi Pembentukan <i>CSIRT</i> Kepri	-	-	Di laksanakan Launching peresmian <i>CSIRT</i> Kepri berdasarkan Penunjukan Computer Security Incident Response Team (<i>CSIRT</i>) Tahun 2020
6.	Pembentukan JKS Pemprov Kepri	-	-	Terlaksananya Kegiatan Jaring Komunikasi Sandi dengan menggunakan email Sanapati antar OPD se Provinsi Kepulauan Riau
7.	Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP)	-	-	Terlaksananya Pemberian Tunjangan Pengamanan kepada Pengelola Pengamanan Persandian sesuai dengan SK Gubernur No.17 Tahun 2020

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masaalah
1	Tata Kelola	
	a. Kurangnya SDM Pegawai Negeri Sipil	Mengusulkan SDM Persandian pada Sub Bagian Kepegawaian untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri untuk diusulkan pada penerimaan CPNS Tahun 2018
	b. Masih kurangnya SDM yang berkualifikasi ahli Sandi (sandiman)	Mealokasikan anggaran pada kegiatan rutin atau kegiatan operasional sandi untuk Diklat Sandiman dan Sandiman dasar
	c. Masih diperlukan aturan-aturan yang terkait persandian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Meneliti dan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait Peraturan-peraturan apa saja yang masih dieprlukan pada Pemerintah Provinsi Kepri terkait pelaksanaan persandian
	d. Masih kurangnya tenaga CSIRT	Koordinasi dengan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
2.	Operasional	
	a. Kurangnya Anggaran	Melakukan Kegiatan yang dapat meningkatkan atensi Pimpinan
	b. Diperlukan pengamanan informasi melalui sertifikat elektronik	Melaksanakan tindak lanjut dari Sertifikat elektronik dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan MOU tentang penerapan Sertifikat EElektronik

		di Provinsi Kepulauan Riau dengan BsRE Lemsaneg
	c. Masih kurangnya kegiatan kontra pengindraan pada Aset dan lokasi strategis di Provinsi Kepulauan Riau	Membuat kegiatan untuk kontra pengindraan pada tahun selanjutnya
3	Pengawasan dan Evaluasi	
	d. Diperlukan penyelenggaraan persandian di Kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau	Meminta laporan akhir kegiatan Persandian dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
	e. Diperlukan self assessment keamanan informasi dengan menggunakan indeks KAMI pada Kabupaten Kota	Membuat <i>self assessment</i> pada keamanan informasi sesuai dengan format Indeks KAMI dari Badan Siber dan Sandi Negara
4.	Pembinaan dan pengawasan (khusus) pemda Provinsi Kepri	
	f. Diperlukan berbagai jenis bimbingan teknis dan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk tenaga Admin Aplikasi dan Website di Pemprov Kepri dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Rau

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Tabel untuk program kerja Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan persandian pada tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 4 Program Kerja Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Operasional)	Rp. 94.086.000,-	Triwulan ke I s.d III 2021
2.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau)	Rp. 93.962.000,-	Triwulan ke I s.d III 2021

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Persandian selama tahun 2020 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik, hal ini diperoleh merupakan hasil dari kerjasama antara beberapa instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara dan Instansi penyelenggara Persandian Di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebagian besar anggaran dan pelaksanaan kegiatan terkendala karena COVID-19
2. Dari 8 usulan kegiatan tahun 2020 diterima sebanyak 2 kegiatan karena keterbatasan anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dialihkan untuk pelaksanaan Pilkada 2020
3. Indikator telah tercapai pada kegiatan persandian pada tahun 2020 :
 - a. Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi
 - c. *IT security Assessment*
 - d. Kontra Penginderaan (Tertunda Covid 19)
 - e. Asistensi Pembentukan C-SIRT Kepri
 - f. Pembentukan JKS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
 - g. Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP)

B. Saran

1. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara (Pemerintah Pusat)

Semoga Kerjasama yang telah dilaksanakan dengan baik dengan beberapa unit kerja pada Badan Siber dan Sandi Negara dapat terus ditingkatkan, dan dalam beberapa hal terutama terkait pelaksanaan diklat sandiman dan Sandiman Dasar dalam hal seleksi dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan beberapa penyesuaian karena untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang baru, sangat diperlukan tenaga Persandian yang telah memiliki kompetensi. Semoga BSSN dapat mengasistensi karena banyak kegiatan dan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena COVID-19

2. Pemerintah Daerah Provinsi (Wakil Pemerintah Pusat)

Pelaksanaan Persandian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan dalam konteks pengamanan informasi terutama untuk pelaksanaan dan tata kelola *E-Government*, masih diperlukan beberapa peningkatan terutama di Sektor SDM dan Pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan di bidang Persandian.

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021



DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke.. /Tahun
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Provinsi Kepulauan Riau;	Didalamnya terdapat pasal yang menjelaskan pengelolaan keamanan informasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2017	-
2.	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Portal Dan Situs <i>Web</i> Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;	Didalam nya terdapat pasal yang menjelaskan terkait keamanan informasi untuk Website dan Portal milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2017	-
3.	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1218 Tahun 2019 tentang <i>Computer Security Incident Response Team</i> Provinsi Kepulauan Riau (KEPRIPROV C-SIRT)	Membangun sistem mitigasi, penanggulangan dan pemulihan serta membangun kapasitas SDM insiden respon	2019	-

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p><u>Drs. Zulhendri, M. Si</u> NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	--	---

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ZULHENDRI	0771 4575023	zulhendri@kepriprov.go.id
2	DIDI MADJDI	0771 4575023	didi.madjdi@kepriprov.go.id
3	DONNY FIRMANSYAH	0771 4575023	firmansyahdonny@kepriprov.go.id
4	EDI WANSYAH	0771 4575023	edi.wansyah@kepriprov.go.id

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT		JABATAN	TMT	
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	19660611 198602 1 004	Pembina Utama Madya /IV.d	02	1986	Kepala Dinas	05	2018
2	19720426 200604 1 003	Penata Tk.I /III.d	04	2006	Kepala Bidang	10	2019
3	19801204 201001 1 013	Penata Tk.I /III.d	01	2010	Kepala Seksi	01	2017
4	19801114 201212 1 001	Penata Muda/ III.a	12	2012	Staff (Sandiman)	04	2019

RAHASIA

C. DATA PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN		PELATIHAN DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI/PERSANDIAN		SERTIFIKASI DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI	
	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	S2	2008	-	-	-	-
2	S1	2001	-	-	-	-
3	S1	2004	Work shoop	-	Keamanan Jaringan	2020
4	D4	2018	Sandiman 131	2019	Keamanan Jaringan	2020

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Drs. Zulhendri, M. Si NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	---	---

RAHASIA

LAMPIRAN III

**DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Penagadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesia pan OPS	Peenggunaan
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SECURE VPN	1 Unit	1104025 19768B	306020700415274	Kasa Diskominfo	Lemsaneg	2011	R.453/LS N/SU/05/ 2012	21 Mei 2012	Baik	-	Endkripsi dan Dekripsi
2	KRIPTOSOFT	1 Unit	3403	306020700414235	Kasa Diskominfo	Lemsaneg	2011	R.453/LS N/SU/05/ 2012	21 Mei 2012	Baik	-	Endkripsi dan Dekripsi
3	LAPTOP FUJITSU	1 Unit	515170 01R1Y00987	3100102003442	Kasa Diskominfo	Lemsaneg	2011	R.453/LS N/SU/05/ 2012	21 Mei 2012	Baik	-	Kirim Terima Berita Email Sanapati

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021



**DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KUNCI SISTEM SANDI												
No	Palsan	MANUAL KEY		Jumlah	Produksi		BAST		Masa Berlaku			Keterangan
		Nama Buku	No. Kunci		Produsen	Tahun	Nomor	Tgl	BB	SB	TB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OTP	Astral	AAI040117	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-
		Arumba (CAD)	AAI040117	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-
2	Kriftosoft	Pinisi	AAI040117	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-
		Patron (CAD)	AAI040117	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-
3	Juklak Penggunaan Kunci Sistem Sandi Manual	-	-	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-
4	Juklak Penggunaan Aplikasi Kalkulator OTP V.20	-	-	1	LEMSANEG	2017	004.2017/TTS/Kemen dagri/Pemprov.Kepri	25/04/2017	BB	-	-	-

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Drs. Zulhendri, M. Si NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	---	---

**DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JUMLAH	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGGUANAAN	KETERANGAN
						INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TANGGAL	(B/R)	(AG/TG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JAMMER HPRC 6 Bands	4725	87	1 Unit	Ruangan Kasa Diskominfo	BSSN	2017	R.BA.112/BSSN/PP.06.02/09/2018	6-Sep-18	Baik	AG	-
2	SPECTRUM ANALYZER PBSA8G	A516292219	58	1 Unit	Ruangan Kasa Diskominfo	BSSN	2019	R.BA.230/BSSN/PP.06.02/12/2019	02-Des-19	Baik	AG	-

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Drs. Zulhendri, M. Si NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
--	---	--

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (Strategis/Tinggi/Rendah)	PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK	BENTUK PENGAMANAN MINIMAL YANG SUDAH TERPASANG	UJI KEAMANAN SISTEM ELEKTRONIK		PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL UJI (Dalam bentuk persentase)		
					PELAKSANAAN	TAHUN	TELAH	SEDANG	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SERTIFIKAT ELEKTRONIK	Tinggi	BSrE	TTE	-	-	-	-	Belum
2.	EMAIL KEPRI PROV	Tinggi	DISKOMINFO	SSL	-	-	-	-	Belum
3.	WEBSITE OPD PROV	Tinggi	DISKOMINFO DAN OPD Terkait	SSL DAN FIREWALL	√	2018	√	-	Sudah
4.	SIMKADA	Tinggi	BPMD	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
5.	SPIPSE	Tinggi	BPMD	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
6.	API ONLINE	Tinggi	BPMD	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
7.	SIRUP LKPP	Tinggi	BALP	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
8.	SPSE	Tinggi	BALP	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
9.	LPSE	Tinggi	PBJS	SSL DAN FIREWALL	√	2018	√	-	Sudah
10.	SIPP	Tinggi	BARENLITBANG	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
11.	E-PLANNING	Tinggi	BARENLITBANG	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum

RAHASIA

12.	APLIKASI SATU DATA	Tinggi	BARENLITBANG	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
13.	SIPD	Tinggi	BARENLITBANG	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
14.	DDS	Tinggi	BIRO PEMBANGUNAN	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
15.	SILAT	Tinggi	BKPSDM	SSL DAN FIREWALL	√	2018	√	-	Sudah
16.	SI KINERJA	Tinggi	BKPSDM	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
17.	SIMPEG	Tinggi	BKPSDM	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
18.	E-DISIPLIN	Tinggi	BKPSDM	SSL DAN FIREWALL	√	2019	√	-	Sudah
19.	SI BAIK	Tinggi	BP2RD	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
20.	WEB SITE DPMPTSP	Tinggi	BPMD DAN PTSP	SSL DAN FIREWALL	√	2019	√	-	Sudah
21.	SIAP-E	Tinggi	PTSP	SSL DAN FIREWALL	-	-	-	-	Belum
22.	SIMANJA	Tinggi	DISKOMINFO	SSL DAN FIREWALL	√	2018	√	-	Sudah
23.	WEB SITE C-SIRT	Tinggi	DISKOMINFO	SSL DAN FIREWALL	√	2019	√	-	Sudah

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Drs. Zulhendri, M. Si NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	---	---

RAHASIA

**DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KETERSEDIAAN		IDENTITAS PROSEDUR	TAHUN TERBIT	TAHUN TERAKHIR REVISI
		ADA	TIDAK ADA			
1	2	3	4	5	6	7
1	Klasifikasi Informasi	Ada	-	-	-	-
2	Jadwal Retensi Arsip	-	Tidak Ada	-	-	-
3	Pemusnahan Arsip	-	Tidak Ada	-	-	-
4	Permintaan Informasi/Dokumen	Ada	-	-	-	-
5	Distribusi informasi/dokumen	Ada	-	-	-	-

RAHASIA

2. Pemusnahan Dokumen

NO	DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN	BERITA ACARA		PELAKSANAAN PEMUSNAHAN
		NOMOR BERITA ACARA	TANGGAL	
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p><u>Drs. Zulhendri, M. Si</u> NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	---	---

**DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	BENTUK LAYANAN	TAHUN	PENERIMA LAYANAN		
			MASYARAKAT*	PEGAWAI**	PERANGKAT DAERAH***
1	2	3	4	5	6
1	PENANGGUALANGAN INSIDEN <i>WEB DEFACEMENT/ HACKING</i>	2020	-	-	√
2	PENYELENGGARAAN TTE	2020	-	-	√
3	PENANGGULANGAN INSIDEN <i>MALWARE</i>	2020	-	√	-
4	<i>COUNTER SURVEILLANCE</i>	2020	-	-	-
5	PEMBENTUKAN JKS	2020	-	-	√

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p><u>Drs. Zulhendri, M. Si</u> NIP. 19660611 198602 1 004</p>	
---	--	---

RAHASIA

**DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA JKS*	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG TERHUBUNG	MEDIA KOMUNIKASI	PERALATAN SANDI YANG DIGUNAKAN
1	2	3	4	5
1	JKS PUSAT	KEMENTERIAN/BADAN/LEMBAGA	MAIL SANAPATI	SECURE MAIL
2	JKS PROVINSI	PERSANDIAN PROVINSI SE INDONESIA	MAIL SANAPATI	SECURE MAIL
3	JKS KABUPATEN/KOTA	PERSANDIAN KAB/KOT SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MAIL SANAPATI	SECURE MAIL
4	JKS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	MAIL SANAPATI	SECURE MAIL

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. Zulhendri, M. Si
NIP. 19660611 198602 1 004



RAHASIA

LAMPIRAN X

**DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA APLIKASI PERSURATAN	PIHAK YANG TERHUBUNG			BENTUK PENGAMANAN YANG SUDAH TERPASANG	MEDIA AKSES		JARINGAN AKSES	
		TU PERANGKAT DAERAH	ES 1 DAN ES 2	SEMUA PEJABAT		Smartphone	PC/ LAPTOP	INTERNET	LOCAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika <u>Drs. Zulhendri, M. Si</u> NIP. 19660611 198602 1 004	 Balai Sertifikasi Elektronik
---	--	--

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
 DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SARANA PENDUKUNG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	Sarana Kerja Adminisrasi <div> a. Sarana Pengolah Data <div> - Desktop1 - Laptop4 - Scanner- </div> b. Sarana Penyimpan Data <div> - Hardisk- - Flashdisk2 - CD- - Box File1 - Brankas1 - Filling Cabinet2 - Lemari2 </div> c. Sarana Komunikasi <div> - Telepon- - Faksimili- - Sarana Internet1 - Radio- </div> d. Sarana Pencetak <div> - Printer1 - Mesin Foto Copy- </div> e. Sarana Tulis Menulis <div> - Ballpoint4 - Pensil4 - Penghapus2 - Spidol1 - Buku Kerja2 - Papan Tulis- </div> a. Sarana Penghancur Data <div> - Alat Penghancur Kertas1 - Palu1 - Sarana Pembakaran- - Gunting1 </div> </div>		Baik 3 Baik, 1 Rusak - - Baik - Baik Baik Baik Baik - - Baik - Baik - Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2	Sarana Kerja Kasa <div> - Bahan Sandi- - Telepon SLJJ- - Faksimili- - Sarana Internet1 - Jaringan Telepon1 </div>		- - - Baik Baik

RAHASIA

3	Sarana Strong Room - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa)	1 -	Baik -
4	Sarana Pendukung - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding	2 2 1 - 2 - 1 1 1	Baik Baik Baik - Baik - Baik Baik Baik
5	Sarana Pengamanan Fisik a. Pengamanan Akses Kontrol - Otentikasi Berbasis Informasi yang diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - Tanda pengenalan (ID card) b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga	- - - 1 - - - 1 - -	- - - Baik - - - Baik - -

Tanjungpinang, 31 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Drs. Zulhendri, M. Si
 NIP. 19660611 198602 1 004

